HARGA CABAI KERING LEBIH STABIL

Solar Dryer Dome, Inovasi Pengeringan Cabai

SLEMAN (KR) - Pengeringan merupakan salah satu teknologi sederhana untuk mendapatkan produk hortikultura dengan daya tahan terjaga lebih lama dengan kualitas yang baik. Pada umumnya petani maupun pelaku usaha pengolahan hasil hortikultura di Indonesia melakukan pengeringan mengandalkan sinar matahari. Tetapi kelemahannya adalah tingkat kerusakan produk cukup besar yang disebabkan oleh hujan, serangga, burung dan jamur.

"Tujuan pengeringan dengan solar dryer dome adalah agar pelaku olahan hortikultura tidak lagi menghadapi tantangan kontaminasi dari debu, air hujan dan cahaya ultraviolet pada hasil olahannya," ungkap Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono, Rabu (9/10), usai berkunjung ke Koperasi PPHPM di Purwobinangun Pakem.

Dijelaskan, solar dryer dome merupakan pengeringan menggunakan tenaga matahari dalam bangunan berbentuk dome atau kubah. Sistem pengeringannya menggunakan bahan polycarbonate yang mampu bertahan 10 hingga 30 tahun. Lantai dome terbuat dari beton atau semen sehingga suhu panasnya merata dan tidak bocor. Alat sederhana ini sangat membantu petani karena proses pengeringan jadi lebih mudah.

"Bantuan bangunan pengering tenaga matahari ini harus dimanfaatkan agar para petani atau pelaku usaha hortikultura dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dijual sampai ke luar daerah,. Namun demikian, petani dalam menghasilkan produk yang kering perlu menjaga kualitas dan higienitas produk selain tujuan utamanya sebagai upaya tunda jual serta meningkatkan nilai tambah produk cabai," pesan Suparmono.

Dalam kunjungan ini, Tim DP3 Sleman diterima oleh Pengurus Koperasi PPHPM yang menceritakan keuntungan menggunakan dome dibanding pengeringan tradisional. "Pengeringan dengan solar dryer dome sangat membantu sekali dalam mengeringkan cabai. Hasilnya cabai kering sampai bagian dalam, cabai tidak berjamur. lebih hygiene, terhindar dari serangga dan warna masih merah." ujar Nanang.

Menurut Nanang, pengeringan menggunakan solar dryer dome hanya butuh waktu kurang dari 7 hari dan dengan tingkat kekeringan 90-100%. Hasilnya bisa dimanfaatkan semua, tidak ada yang busuk maupun terbuang. "Sayangnya kapasitasnya masih sangat terbatas. Satu unit ini memiliki 24 tray dengan kapasitas 10 kg cabai basah, sehingga satu kali pengeringan hanya dapat menampung 240 kg cabai segar," ungkapnya.

PPHPM selama ini telah berhasil memfasilitasi pemasaran cabai segar petani cabai se Kabupaten Sleman. Anggota Koperasi PPHPM sekitar 6.500 petani, tersebar di 14 titik kumpul se Kabupaten Sleman. Jumlah cabai yang dikumpulkan setiap malam mencapai 6-9 ton yang dipasarkan keluar daerah.

"Saat ini produk yang paling melimpah adalah CMK, setiap malam bisa mencapai 4-5 ton. Kapasitas pengeringan dgn solar dryer dome masih jauh dibawah itu, jadi kita masih pasarkan produk segar," tambah Nanang.

Untuk menghasilkan 1 kg cabai kering dibutuhkan 5 kg cabai segar. Jika harga cabai kering mencapai di pasaran antara Rp 70.000 - Rp 150.000/kg, jika harga cabai segar CMK saat ini Rp 6.009/kg, hanya dibutuhkan modal Rp 30.045/kg. Selisih harga antara modal dan harga jual ini tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan harga beli cabai segar dari petani. "Harga cabai kering lebih stabil dibandingkan cabai segar yang fluktuatif, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar," pungkasnya.

Suparmono menambahkan, polycarbonate pada solar dryer dome ini sangat berperan penting untuk menjaga mutu hasil hortikultura yang dikeringkan. Keunggulan solar dryer dome ini umur produk lebih lama, aroma produk tetap kuat, rasa produk tidak hilang dan yang paling penting mutu berkualitas. "Pas pintunya dibuka, aroma cabai yang pedas menusuk hidung, mantab!" ujarnya. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Hasil panen cabai merah keriting memiliki nilai lebih apabila dikeringkan dibanding dijual basah.

LINDUNGI KESELAMATAN KERJA

1.987 Pengawas Pemilu Ikut BPJS Ketenagakerjaan

SLEMAN (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman mendaftarkan 1.987 jajaran pengawas Pemilu Adhoc se-Kabupaten Sleman ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sleman. Hal itu dalam rangka melindungi keselamatan kerja jajaran pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Sleman Arjuna al Ichsan Siregar menjelaskan, Bawaslu Sleman telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sleman. Kerja sama ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap keselamatan dan kesejahteraan jajaran pengawas adhocnya saat menjalankan tugas.

"Terdapat 1.987 pengawas adhoc yang kami daftarkan, terdiri dari 170 Panwaslu Kecamatan dan jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan, 86 Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 1.731 Pengawas TPS," jelasnya, Rabu (9/10).

KR-Istimewa

Ketua Bawaslu Sleman saat melakukan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Sleman.

Kepesertaan jajaran Pengawas Pemilu adhoc dalam BPJS Ketenagakerjaan ini, lanjut Arjuna, manfaat yang didapatkan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan kecelakaan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan di antaranya adalah biaya pengobatan dan perawatan yang tidak terbatas, santunan upah sementara karena tidak mampu bekerja di enam bulan pertama sebesar 100% kali upah sebulan, santunan meninggal karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah sebulan, santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar Rp 22 juta, serta biaya homecare maksimal Rp 20 juta.

"Sedangkan untuk jaminan kematian dengan risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau sakit, peserta mendapatkan manfaat berupa santunan kematian dan biaya pemakaman Rp 42 juta. Selain itu beasiswa untuk 2 orang anak jika terjadi risiko cacat tetap atau meninggal dunia sebesar Rp 174 juta dengan kepesertaan minimal 3 tahun," tambah Arjuna.

Mewakili pihak BPJS Ketenagakerjaan, Rudi Susanto menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman atas kebijakan yang diambil. Hal itu merupakan langkah yang tepat untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada jajaran pengawas Pemilu adhoc. "Kebijakan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Sleman ini menjadi percontohan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota lain yang ada di DIY," ujarnya. **(Sni)-f**

Politeknik LPP Yogyakarta Bangun Gedung Baru

SLEMAN (KR) - Politeknik LPP Yogyakarta membangun gedung baru Kampus 2 di Kandangan Margodadi Seyegan, Selasa (8/10). Momentum tersebut bersamaan dengan kuliah umum di Auditorium LPP.

Turut hadir Direktur Hubungan Kelembagaan dan Manajemen Risiko PT Sinergi Gula Nusantara Aris Toharisman, Pembina Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY) Gunawan Ciptadi dan Ketua YPPY Sosiawan Hary Kustanto.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Persero Dr Ir Mohammad Abdul Ghani MSc menjelaskan, pengurus yayasan menargetkan pembangunan kampus baru ini 24 bulan. "Tapi saya minta 20 bulan supaya lebih cepat," tegasnya.

Pihaknya juga berharap masyarakat sekitar dapat menikmati dan memperoleh manfaat dari kehadiran kampus ini. "Kalau kampus ini dihuni seribu mahasiswa yang 1 harinya berbelanja Rp 25.000, maka sudah Rp 25 juta perhari ekonomi berputar di sini," paparnya.

Sementara Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Ir M Mustangin ST MEng IPM mengungkapkan, rencananya kampus dibangun empat lantai dilengkapi masjid, asrama, lapangan parkir dan lainnya."Luas bangunan 5.000 meter dan tanah 6.000 meter. Konsep gedungnya moderen dan *green* dengan pencahayaan alami, ruang hijau banyak dan menyejukkan," jelasnya. **(Sal)** -f

KR-Surya Adi Lesmana

Peletakan batu pertama kampus 2 Politeknik LPP Yogyakarta.

KPU Gelar Tiga Kali Debat Paslon

SLEMAN (KR) - Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati direncanakan mengikuti debat sebanyak tiga kali. Debat bakal digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman pada akhir Oktober dan November mendatang.

Menurut Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Huda Al Amna, sesuai dengan penyelenggaraan pilkada di periode sebelumnya, KPU akan memafisilitas debat antar-pasangan calon bupati dan wakil bupati. Rencananya debat diselenggarakan tiga kali selama masa kampanye berlangsung.

"Sesuai kesepakatan bersama dengan perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati, debat diselenggarakan pada hari Minggu. Rencananya, debat digelar pada 20 Oktober, 27 Oktober dan 3 November 2024. Debat pertama hanya menampilkan calon bupati, debat kedua wakil bupati dan untuk debat ketiga pasangan calon akan tampil bersama-sama," kata Huda, Rabu (9/10).

Lebih jauh dijelaskan, ada beberapa alasan kenapa debat dilaksanakan di hari Minggu. Hari libur ini dipilih karena tidak banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat sehingga diharapkan bisa menonton debat guna mengetahui visi misi maupun program yang dimiliki calon.

"Diharapkan dengan strategi ini, yang menonton bisa lebih banyak agar pandangan tentang calon bisa diketahui lewat debat. Jadwal pelaksanaan debat sudah ada dan sekarang masih kita matangkan konsepnya. Rencananya juga disiarkan di televisi," ujar Huda.

Selain debat, KPU Sleman juga akan memafilitasi bahan dan alat peraga kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. **(Sni)-f**

PASTIKAN KELANCARAN PELAYANAN PUBLIK

MPP Sleman Siap Dioperasionalkan

SLEMAN (KR) - Pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Sleman di Padukuhan Beran Lor Tridadi Kabupaten Sleman tahun ini telah selesai. Gedung baru dengan empat lantai tersebut siap digunakan pada Desember 2024 mendatang.

"MPP memiliki empat lantai berfungsi sebagai pusat layanan publik yang modern dan efisien. Bangunan ini siap dimanfaatkan pada Desember 2024," kata Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo kepada wartawan belum lama ini.

Pembangunan fisik MPP di Kabupaten Sleman dikerjakan dengan skema anggaran multiyear, yakni tahun 2022 dan 2023 yang menelan anggaran Rp 66.327.-731.000. Gedung tersebut dibangun dengan konsep desain modern yang dikombinasi corak kearifan lokal.

KR-Hasto Sutadi

Bangunan MPP Sleman yang megah siap dioperasionalkan pada bulan Desember mendatang.

"Kontruksinya terdiri dari empat lantai dan satu semi basement di bagian bawah. Fungsi basemen dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor. Sedangkan lantai 1 dan 2 rencananya digunakan untuk pelayanan publik. Sementara di lantai 3 dan 4 merupakan area kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman. Gedung tersebut juga dilengkapi fasilitas eskalator yang menghubungkan lantai 1 dan 2. Kemudian di lantai 3 dan 4 dipasang lift," beber Kusno.

Sementara jenis layanan yang akan difasilitasi di MPP Sleman antara lain pelayanan perizinan, pelayanan retribusi dan sejumlah pelayanan publik lainnya. " Pemkab Sleman melakukan pembangunan infrastruktur untuk memastikan kelancaran pelayanan publik," tambah Kusno. **(Has)** -f

SESARENGAN MBANGUN SLEMAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BerAKHLAK

STOP PORNOGRAFI BAGI ANAK

Upaya Pemkab Sleman Wujudkan Generasi Emas

PEMKAB Sleman berkomitmen melakukan berbagai upaya guna membentuk karakter dan moral anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satunya dengan mencegah dan menangani aktivitas pornografi. Sejak 2017, Pemkab Sleman telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) melalui Keputusan Bupati No. 26.2/Kep. KDH/A/2017. Kebijakan ini kami sinergikan dengan Kep Bupati Nomor 40.1 /Kep.KDH/-A/2022 terkait pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Anak di Jalanan (STPKAJ).

Pjs Bupati Kusno Wibowo

Kami menyadari pencegahan pornografi harus dilakukan sinergis. Oleh karena itu kami menggandeng lintas instansi di antaranya Polresta, Kodim, Kejari, Kemenag, dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Pemda DIY.

Ruang lingkup penanggulangan pornografi di Sleman meliputi pencegahan penanganan dan pemulihan pornografi. Pencegahan pornografi bagi anak dilakukan dengan pemetaan fenomena kerawanan pornografi melalui inspeksi mendadak (sidak) pada peserta didik secara berkala oleh GTP3 dan STPKAJ melalui kegiatan Satpol PP Goes To School & Kegiatan Gerakan Bersama Perlindungan Anak (Geber Penak).

Sebagai upaya preventif, Pemkab Sleman melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya pornografi bagi anak melalui Bimtek penguatan Forum Anak, Bimtek penguatan Forum Generasi Berencana, sosialisasi bagi Saka Pramuka, masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), Satpol PP Goes to School dan melalui media sosial. Melalui Geber Penak, kami berupaya melakukan pendekatan sosialisasi dan pendampingan psikologis di setiap strata pendidikan.

Sosialisasi bahaya pornografi juga untuk wali murid melalui forum komite sekolah dan forum pertemuan wali murid. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi bagi tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pamong sekolah, pengasuh dan pendamping di pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Mengantisipasi akses konten pornografi dari internet, Pemkab Sleman melakukan pembatasan akses pornografi dengan memblokir konten pornografi melalui Program Internet Sehat Kemenkominfo. Pembatasan akses dilakukan pada jaringan internet yang dikelola Pemkab pada fasilitas wifi gratis di 1.331 titik padukuhan dan di fasilitas pelayanan publik.

Sedangkan bagi korban dan pelaku pornografi usia anak, kami memberikan pendampingan melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan Keluarga Sejahtera yang Sembada (Kesengsem), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan KPAD Sleman. Upaya pembinaan masyarakat dilakukan Puspaga Kesengsem, Puspaga Kalurahan, Unit Bimas Polresta/Polsek, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta, Ikatan Psikologi Klinis Wilayah Yogyakarta, dan Forum Anak Sleman.

Lngkah ketiga yakni pemulihan pornografi bagi anak. Upaya ini dengan membangun sistem rujukan layanan rehabilitasi pornografi pada lembaga lembaga layanan, seperti Puspaga, Puskesmas, RSUD, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya-upaya yang telah kami lakukan akan berhasil jika didukung upaya sinergis dari seluruh lapisan masyarakat. Keluarga adalah kunci utama melindungi anak-anak dari bahaya pornografi. Mari kita ciptakan suasana rumah penuh keterbukaan, anak merasa nyaman berbicara dan bertanya. Mari bersama-sama, jadikan keluarga sebagai benteng pertama yang kuat dalam melindungi anak-anak dari ancaman pornografi dan memastikan masa depan mereka yang lebih baik. ■-f